

# INISIASI KEBIJAKAN MENUJU PENGUATAN PENDIDIKAN HUMANIS-RELIGIUS

Arif Rohman

Program Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Arif\_rohman@uny.ac.id

## Abstrak

Pendidikan diyakini memiliki peran penting dalam memberikan jalan keluar atas problem sosial yang ada. Salah satu hasil terpenting dari penyelenggaraan pendidikan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbukti dapat membantu manusia dalam memecahkan problem sosialnya. Namun ironisnya, justru praktek penyelenggaraan pendidikan itu sendiri yang mengidap problem, di antaranya adalah demoralitas pendidikan. Oleh karenanya diperlukan inisiasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut melalui rekonstruksi moralitas untuk mengembalikan misi utama pendidikan demi terwujudkannya tipologi pendidikan yang humanis-religius. Lima pilar moralitas pendidikan yang dapat menjaga tegaknya penyelenggaraan pendidikan yang humanis-religious adalah: (1) *fardhiyyah morality*, (2) *usariyyah morality*, (3) *ijtimaiyyah morality*, (4) *daulah morality*, dan (5) *diniyyah morality*. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan tegaknya moralitas pendidikan adalah melalui pengembalian praktek penyelenggaraan pendidikan kepada *khittah-nya* yaitu pengembalian kepada misi pendidikan pembebasan. Segala perangkat dan pendukung yang ada seperti guru, kurikulum, manajemen, model pembelajaran, sistem evaluasi, peraturan-peraturan pendukung dan lain-lain keseluruhannya perlu diorientasikan kepada misi utama pengikisan aneka praktek yang mendistorsikan nilai luhur pendidikan, dengan penerapan model humanis-religius di sekolah, yaitu model: (1) *Konsiderasi*, (2) *Pembentukan rasional*, (3) *Klarifikasi nilai*, (4) *Pengembangan moral kognitif*, dan (5) *Nondirektif*.

**Kata kunci:** pendidikan, moralitas, dan nilai humanis-religius

## Abstract

Education is believed has an important role in providing solutions for the social problems. One of the most important results of education is the advancement of science and technology that has been helping human to solve their social problems. Ironically, the practice of the education itself has problems, one of them is the demoralization of education. Therefore, policy initiation is needed to overcome those problems through the morality reconstruction to restore the primary mission of education for the realization of a humanist-religious education. Five pillars of educational morality that are able to maintain the continuity of humanist-religious education are: (1) *fardhiyyah morality*, (2) *usariyyah*

morality, (3) ijtima'iyyah morality, (4) daulah morality, and (5) diniyyah morality. The steps that required to restore educational morality are taken through the return of educational practice to its khittah, namely the return to the liberation education mission. All existing tools and support systems, such as teachers, curriculum, management, learning models, evaluation systems, supporting regulations, and others, should refer to the main objective of eradicating the various practices that distort the educational value. It can be done by applying the religious-humanist models in schools, namely: (1) consideration, (2) rational formation, (3) clarification of values, (4) cognitive moral development, and (5) non-subjective.

**Keywords:** *Education, Morality, and Humanist-religious Values*

## PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang dicapai sampai dewasa ini di samping berdampak positif yakni telah membawa kepada tingginya peradaban dengan segala kemudahan hidup yang diperoleh umat manusia, juga berdampak negatif atau kurang menggembirakan. Dampak negatif tersebut disinyalir para ahli sebagai proses anti klimaks dari kemajuan ipteks tersebut. Diantaranya adalah merebaknya aneka problem sosial, seperti: aids, kriminalitas, pornoaksi, perlombaan senjata, polusi, inflasi, dan krisis energi (Fritjof Capra, 1997). Aneka problem sosial tersebut diindikasikan sudah merebak baik berskala lokal maupun global.

Munculnya aneka problem sosial baik berskala lokal maupun global di atas menurut Muhammad Abdurrahman (2003) bukan akibat dari kemajuan ipteks semata, akan tetapi yang lebih utama justru akibat dari merosotnya moralitas manusianya. Kemerosotan moralitas manusia tersebut bahkan terjadi secara kelewat batas sampai pada akhirnya melewati kewajaran dan mencapai tingkat akut-mengkhawatirkan. Kemerosotan moralitas manusia tersebut pada gilirannya mengarah kepada bentuk-bentuk perilaku moral manusia yang bersifat eksploitatif-destruktif dengan menabrak nilai humanis dan nilai religius.

Kemerosotan moralitas umat manusia yang sangat mengkhawatirkan di atas menurut Muhammad Abdurrahman (2003) bila dirunut ke belakang berpangkal dari penyelenggaraan pendidikan modern yang kurang berlandaskan moralitas humanis-religius. Pendidikan modern menurutnya telah kering dari hakekat nilai-nilai spiritual sebagai sumber tegaknya moralitas. Pendidikan modern dewasa ini lebih mengedepankan rasionalitas dan instrumentalitas. Padahal model pendidikan yang semacam ini sebenarnya telah dikritik habis-habisan oleh kaum pedagogi kritis seperti Paulo Freire, Marthin Cornoy, Ivan Illich, E. Reimer, dan lain-lain. Karena pendidikan yang mengedepankan rasionalitas dan instrumentalitas dengan sendirinya menyepelekan spiritualitas dan humanitas secara menyeluruh.

Atas dasar hal di atas, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah potret demoralitas pendidikan yang berlangsung khususnya di Indonesia? Upaya seperti apakah agar penyelenggaraan

pendidikan dapat dibangun menuju tipologi pendidikan humanis-religius demi terwujudnya manusia Indonesia yang kreatif-moralis?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Keprihatinan atas Moralitas Pendidikan**

Menurut banyak ahli, dewasa ini kondisi pendidikan tengah mengalami keprihatinan, bahkan oleh Mansour Fakih (Francis Wahono, 2001) disebutkan sebagai mengalami suatu ancaman. Ancaman ini muncul baik dari adanya intervensi dan ekspansi pihak luar seperti penguasa dan pengusaha yang berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat bagi mereka, tetapi juga ancaman yang bersumber dari dalam seperti penataan dan penyelenggaraan oleh pelaku pendidikan yang konservatif sekedar formalistik dan ritualistik (Illich, 1971; Freire, 2002).

Penyelenggaraan pendidikan yang sekedar konservatif, formalistik, dan ritualistik tersebut pada gilirannya telah menjauhkan diri dari upaya-upaya kritis dalam pencarian kekurangan segenap dimensi penyelenggaraan pendidikan yang ada, terutama kepada hal-hal paling mendasar. Hal mendasar itu menurut Muhammad Abdurrahman (2003) adalah menyangkut moralitas pendidikan.

Menurut pandangan Muhammad Abdurrahman (2003) praktek penyelenggaraan pendidikan modern di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan indikator yang telah menyimpang dari kaidah-kaidah moralitas (*akhlak*). Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan telah bergeser dari yang bersifat spiritualistik kepada hal-hal yang bersifat sekularistik dan materialistik, dari yang bercorak profetik berubah menjadi pragmatik, dan dari substantif lambat laun menjadi periferialistik. Pada intinya, penyelenggaraan pendidikan Indonesia modern lambat laun telah tereduksi dan kehilangan fitrah moralitasnya.

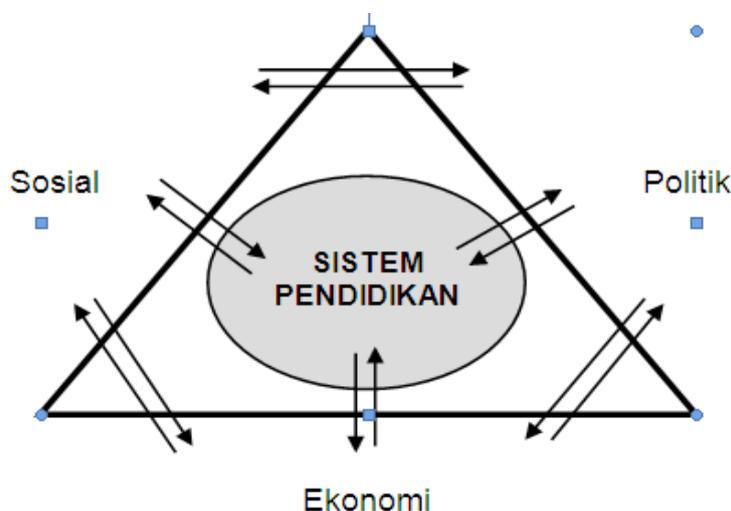
Potret penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang dari kaidah-kaidah moralitas (*akhlak*) tersebut pada gilirannya juga menghasilkan lulusan yang kurang memiliki moralitas terpuji dalam dirinya. Moralitas yang dimaksud adalah yang mencakup tiga dimensi moral, yaitu: pengetahuan moral (*moral knowing*), penghayatan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral action*). Ketiga dimensi moral tersebut seyogyanya dikembangkan saling terikat dan terkait secara holistik-komprehensif.

Pada bagian lain, corak dan perkembangan praktek pendidikan sangat terkait erat dengan tipologi masyarakat dalam mana praktek pendidikan berlangsung. Antara tipologi praktek pendidikan dengan tipologi masyarakatnya merupakan dua hal yang paralel dan terkait satu sama lain. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan menurut Fagerlind dan Saha (1983), keduanya membentuk hubungan saling mempengaruhi yang bersifat fungsional-dialektis. Satu sisi pendidikan adalah produk masyarakat, namun disisi lain pendidikan mempengaruhi masyarakat dengan menumbuhkan perubahan-perubahan. Masyarakat yang dimaksud Fagerlind dan Saha (1983), berintikan dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga dimensi kehidupan dalam masyarakat tersebut memiliki keterkaitan fungsional-dialektis. Berikut ini disajikan tampilan skema hubungan yang dimaksud.

Gambar1

Skema Hubungan Sistem Pendidikan dengan Tiga dimensi Kehidupan Masyarakat

(Fagerlind dan Saha, 1983)



Kondisi masyarakat Indonesia adalah sosok masyarakat dengan jumlah besar yang mayoritas muslim. Sebagai masyarakat yang menghimpun diri dalam suatu negara yang penduduknya mayoritas muslim tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi yang luar biasa bila mampu dioptimalkan perannya. Namun realitasnya, kuantitas yang besar tersebut tidak didukung oleh kualitas dan kekompakan serta loyalitas manusia muslim terhadap sesama, agama, dan fakir miskin yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Sehingga kuantitas yang begitu melimpah tidak menjadi keuntungan akan tetapi justru menjadi beban.

Perbincangan mengenai masyarakat menurut Muhammad Abdurrahman (2003) sebenarnya sangat terkait dengan tiga konsep dasar yang diambil dari istilah arab dengan masing-masing memiliki konotasi hampir sama, yaitu: *daulah* (negara), *mulk* (penguasa), dan *umran* (peradaban). Istilah masyarakat dalam terminologi Al-Qur'an dinyatakan dengan istilah *ummah*, yakni sebuah komunitas muslim yang hidup bersama dalam rangka tunduk dan taat kepada *syariah*, adat istiadat dan peradaban Islam. Mereka selalu melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* (mengajak ke arah kebaikan dan menyeru untuk meninggalkan kejahatan), memperbanyak *amai sholih* (tindakan terpuji), saling tolong menolong (*tawasuth*), dan kerukunan antar sesama manusia saling mengasihi dan mencintai (*ukhuwah insaniyah*).

Pengertian *ummah* berasal dari kata dasar *amm* yang bermakna 'tujuan' atau 'maksud', pun pula bisa berasal dari kata *umm* yang artinya 'ibu'. Namun dalam pengertian kedua ini (*umm*), kata *ummah* tidak sekedar berkonotasi pada makna ibu pertiwi dalam batas-batas wilayah geografis, namun lebih mengandung arti tauhid dan iman yakni kolektivitas yang diikat oleh keimanan dan ideologi persamaan dan persaudaraan. Sehingga dalam konteks Islam yang disebut masyarakat Islam (*Islamic society*) adalah masyarakat yang di dalamnya hidup antar sesama yang selalu memegang teguh aturan hukum (*syari'ah*),

berani (*syaja'ah*) dan ikhlas dalam mempertahankan eksistensi, harga diri, dan ketauhidannya dari segala ancaman atau ideologi yang berusaha memusnahkannya.

Masyarakat religius menurut Muhammad Abdurrahman (2003) memiliki karakteristik: (1) sebagai masyarakat etis, (2) masyarakat agamis, dan (3) masyarakat altruis. Masyarakat religius yang hidup di zaman modern dewasa ini disarankan berani menghadapi berbagai jenis rintangan dan halangan berupa ideologi Barat, teknologi modern, sekularisme dan peradaban budaya Barat. Dalam pandangan Muhammad Abdurrahman (2003), para pemimpin Islam dari negara-negara Islam telah gagal menggerakkan dan memobilisasi ummat dikarenakan mereka telah menjadi sekutu paling dekat atau kawan karib pemerintah Barat. Hal ini dikuatkan dengan pendapat *Abdul Hamid Abu Sulayman*, yang menyebutkan: “*Jelas-jelas para pemimpin Islam telah melupakan kewajibannya*”.

Tipologi masyarakat yang telah mendistorsikan dirinya dari nilai-nilai agama atau religious dalam praktek kehidupan tersebut pada gilirannya juga melahirkan tipologi pendidikan yang distorsif. Pendidikan yang baik menurut Muhammad Abdurrahman (2003) adalah pendidikan yang mempunyai falsafah dan tujuan-tujuan tertentu yang jelas. Falsafah dan tujuan pendidikan adalah terbentuknya pribadi utuh yang memiliki akhlak dan sopan santun serta penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keseharian.

Falsafah dan tujuan pendidikan yang demikian itu menurut Muhammad Abdurrahman (2003) mendasarkan atas hadits yang berbunyi: “*innamaa bu'istu li utammima makaarimal akhlaaq*”, yang berarti: aku (Muhammad) diutus ke dunia ini adalah dalam rangka menyempurnakan budi pekerti/akhlak. Atas dasar ini maka orientasi utama dari proses pendidikan adalah upaya setinggi-tinggi membentuk pribadi manusia yang *berakhlakul karimah*.

Orang yang memiliki *akhlakul karimah* diyakini akan selalu bertindak adil, mampu beramal shalih, *amar ma'ruf nahi mungkar*, peduli terhadap sesama dan fakir miskin, serta memiliki komitmen terhadap tegaknya nilai-nilai religius. Mengenai *amar ma'ruf nahi mungkar* sesuai dengan kaidah agama yang berbunyi: “*man ra'a minkum munkaron fal yughoyyir biyadih, faillam yastati' fabillisaanah waillam yastati' fabiqolbih, ala wahiya ad'aful imaan*” (barang siapa di antara kalian menemui kemungkaran di muka bumi ini maka hendaklah engkau perbaiki melalui kekuasaanmu, tetapi bila engkau tidak mampu hendaklah perbaiki melalui perkataanmu, itupun masih tidak mampu maka gunakan melalui hatimu, ingat sesungguhnya yang demikian itu adalah yang paling lemah iman).

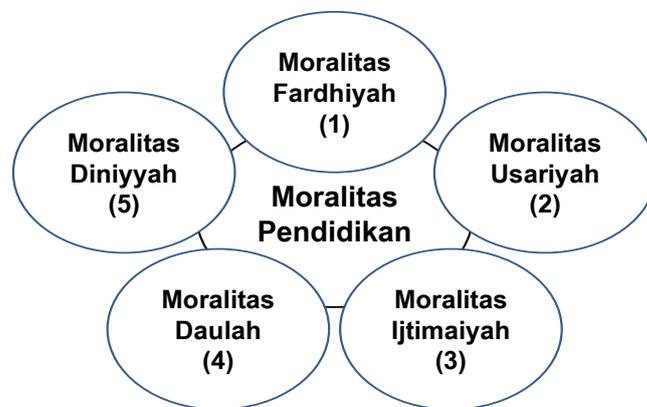
*Akhlakul karimah* tersebut mencakup lima dimensi kehidupan, yaitu: *pertama*, *akhlakul karimah fardhiyyah*, yakni perilaku moral yang baik dalam konteks dan untuk kepentingan bagi diri sendiri atau individu yang bersangkutan. Misalnya perilaku bermoral ketika makan, tidur, berpakaian, mau mandi, dan lain-lain. *Kedua*, *akhlakul karimah usariyyah*, adalah perilaku moral yang baik dalam konteks hidup di dalam keluarga atau berkeluarga. Misalnya: perilaku bermoral ketika menyapa anak, menemui istrinya, memimpin keluarga, membesarkan anak, dan lain-lain.

*Ketiga*, akhlakul karimah *ijtima'iyah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup kemasyarakatan. Dalam hal ini perilaku bermoral seseorang seperti: selalu menyapa dengan ramah, murah senyum dengan orang lain, rajin silaturahmi, suka menolong, selalu bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, lapang dada dalam memberi maaf orang lain, dan lain-lain.

*Keempat*, akhlakul karimah *daulah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup bernegara. Antara lain berperilaku baik berupa taat peraturan dan taat kepada pemimpin. *Kelima*, akhlakul karimah *diniyyah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup beragama.

Gambar 2.

Lima Pilar Moralitas Pendidikan



Untuk mampu menghasilkan lulusan berupa manusia yang berakhlakul karimah di atas, diperlukan adanya seorang pendidik atau guru yang relevan. Guru yang diperlukan menurut pendapat Qazi Ibnu Jama'ah (Muhammad Abdurrahman, 2003) adalah sosok guru yang tidak pernah absen membaca kitab suci sambil menghayati maknanya. Sosok guru yang ideal adalah penghafal kitab suci (*al khafidh*). Hal ini disebabkan tugas guru adalah sebagai pendakwah dan penyebar risalah tauhid baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di tengah-tengah masyarakat sebagai tokoh panutan.

Seorang guru yang baik adalah sosok yang murah senyum, sabar, berperilaku baik terhadap orang-orang miskin, berani menanggung kebutuhan fakir miskin, dan menyayangi muridnya. Sehingga sosok guru adalah yang memiliki kualitas dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, moral, dan cinta atau loyal kepada agama.

Guru yang kurang baik adalah mereka yang tidak mampu menjadikan dirinya sebagai pendakwah dan penegak tauhid. Guru yang apatis terhadap kondisi kemerosotan moral di masyarakat tergolong ikut terlibat sebagai jahiliyyah atau *konspirasi jahiliyyah*. Menurutnya, *konspirasi jahiliyyah* adalah semua pihak yang perbuatannya apatis terhadap kebiadaban dan kesengsaraan umat. Termasuk guru dan ulama yang diam karena takut terhadap adanya kebiadaban di tengah-tengah masyarakatnya.

Kritik dari Muhammad Abdurrahman (2003) atas kondisi demoralitas pendidikan Indonesia di atas oleh beberapa kalangan dirasakan memiliki sisi positif sebagai bentuk apresiasi kepadanya. Lebih-lebih pada era dewasa ini kondisi demoralitas tersebut telah merambah ke hampir seluruh dimensi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk kondisi yang oleh para ahli disebut fenomena komersialisasi pendidikan. Ketika banyak lembaga pendidikan yang menaikkan pungutannya kepada siswa dengan dalih untuk peningkatan layanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru, pada gilirannya telah mendorong kepada mahalnya biaya pendidikan. Dengan demikian menjadikan kritik dari Muhammad Abdurrahman mendapat relevansinya.

## **B. Menegakkan Moralitas Pendidikan**

Dengan memperhatikan kenyataan akan demoralitas pendidikan tersebut banyak kalangan yang mengkhawatirkan akan masa depan Indonesia. Praktek pendidikan yang telah susah payah diselenggarakan dikhawatirkan berujung pada kondisi *'kontra-produksi'* yang pada akhirnya tidak saja merusak dunia pendidikan itu sendiri tetapi juga dapat merusak tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk itu, upaya untuk mengembalikan kondisi moralitas pendidikan sangat dibutuhkan.

Beberapa langkah yang diperlukan dalam mengembalikan tegaknya moralitas pendidikan adalah: *pertama*, praktek penyelenggaraan pendidikan perlu *khittah* kepada misi sebenarnya yaitu pembebasan. Pendidikan sebagai praktek pembebasan menurut Syafii Maarif (1991) dengan mengutip Paulo Freire, adalah pendidikan yang dapat 'menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia dan dengan demikian mengubahnya'. Penegasian terhadap misi pembebasan ini sama artinya dengan penolakan terhadap fitrah pendidikan sebagai wahana peningkatan kualitas kemanusiaan.

*Kedua*, oleh karena penyelenggaraan pendidikan mengandung misi pembebasan, maka segala perangkat dan pendukung yang ada seperti guru, kurikulum, manajemen, model pembelajaran, sistem evaluasi, peraturan-peraturan yang diciptakan dan lain-lain keseluruhannya perlu diorientasikan kepada misi pembebasan tersebut. Dengan kata lain segenap perangkat dan pendukung terselenggaranya pendidikan tidak diperbolehkan berproses bertentangan dengan misi pembebasan. Sehingga bisa diilustrasikan, bila hal pertama diasumsikan sebagai 'roh' yang melandasi tindakan mendidik maka hal yang kedua diibaratkan sebagai jasad yang berindak dalam praksis pendidikan.

*Ketiga*, setelah kokoh dari segi roh alias misi profesinya beserta implementasi praktek pendidikan yang dilakukan oleh komunitas pendidik, maka langkah selanjutnya adalah pengikisan terhadap aneka praktek yang pendidikan sebagaimana telah dimaksud di atas. Aneka praktek distorsi penyelenggaraan pendidikan misalnya: komersialisasi pendidikan, praktek pembelajaran anti dialog, pelunturan norma-norma susila dan agama dalam praktek pergaulan antar insan pendidikan, dan pengebirian indikator mutu lulusan hanya sekedar selembat ijazah.

*Keempat*, dari segi praksis pendidikan diperlukan upaya penerapan metode pendidikan di dalam kelas yang lebih *humanis religious* diantaranya menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005) mencakup:

(1) *Model Konsiderasi*, (2) *Model pembentukan rasional*, (3) *Klarifikasi nilai*, (4) *Pengembangan moral kognitif*, dan (5) *Model nondirektif*.

*Model konsiderasi diterapkan dengan mendasarkan diri pada asumsi bahwa manusia* seringkali bersifat egoistis, lebih memperhatikan, mementingkan, dan sibuk mengurus dirinya sendiri. Melalui penggunaan model konsiderasi (*consideration model*) siswa didorong untuk lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain, sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama, dan hidup secara harmonis dengan orang lain.

Langkah-langkah pembelajaran *model konsiderasi* adalah: (1) menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konsiderasi, (2) meminta siswa menganalisis situasi untuk menemukan isyarat-isyarat yang tersembunyi berkenaan dengan perasaan, kebutuhan dan kepentingan orang lain, (3) siswa menuliskan responsnya masing-masing, (4) siswa menganalisis respons siswa lain, (5) mengajak siswa melihat konsekuensi dari tiap tindakannya, (6) meminta siswa untuk menentukan pilihannya sendiri.

*Model pembentukan rasional adalah satu model pendidikan dan pembelajaran yang menempatkan bahwa manusia adalah sosok yang* berpegang pada nilai-nilai sebagai standar bagi segala aktivitasnya. Nilai-nilai ini ada yang tersembunyi, dan ada pula yang dapat dinyatakan secara eksplisit. Nilai juga bersifat multidimensional, ada yang relatif dan ada yang absolut. Model pembentukan rasional (*rational building model*) bertujuan mengembangkan kematangan pemikiran tentang nilai-nilai.

Langkah-langkah pembelajaran model pembentukan rasional, adalah: (1) mengidentifikasi situasi dimana ada ketidakserasian atau penyimpangan tindakan, (2) menghimpun informasi tambahan, (3) menganalisis situasi dengan berpegang pada norma, prinsip atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, (4) mencari alternatif tindakan dengan memikirkan akibat-akibatnya, (5) mengambil keputusan dengan berpegang pada prinsip atau ketentuan-ketentuan legal dalam masyarakat.

*Model klarifikasi nilai* adalah model pendidikan dan pembelajaran yang meyakini bahwa setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas atau terselubung, disadari atau tidak. Klarifikasi nilai (*value clarification model*) merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai (*valuing process*) dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Penggunaan model ini bertujuan, agar para siswa menyadari nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkan dan merefleksikannya, sehingga para siswa memiliki keterampilan proses menilai.

Langkah-langkah pembelajaran model klarifikasi nilai: (1) pemilihan: para siswa mengadakan pemilihan tindakan secara bebas, dari sejumlah alternatif tindakan mempertimbangkan kebaikan dan akibat-akibatnya, (2) mengharagai pemilihan: siswa menghargai pilihannya serta memperkuat-mempertegas pilihannya, (3) berbuat: siswa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pilihannya, mengulanginya pada hal lainnya.

*Model pengembangan moral kognitif adalah model pendidikan dan pembelajaran yang didasari pada anggapan bahwa perkembangan moral manusia berlangsung melalui restrukturalisasi atau reorganisasi kognitif, yang berlangsung secara berangsur melalui tahap pra-konvensi, konvensi dan pasca konvensi. Model ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif.*

Langkah-langkah pembelajaran model **pengembangan moral kognitif adalah:** (1) menghadapkan siswa pada suatu situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai, (2) siswa diminta memilih salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu, (3) siswa diminta mendiskusikan/menganalisis kebaikan dan kejelekannya, (4) siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang lebih baik, (5) siswa menerapkan tindakan dalam segi lain.

*Model nondirektif adalah model pendidikan dan pembelajaran yang melihat potensi dan kemampuan para siswa dapat berkembang sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa dan berperan sebagai fasilitator dan konselor dalam pengembangan kepribadian siswa. Penggunaan model ini bertujuan membantu siswa mengaktualisasikan dirinya.*

Langkah-langkah pembelajaran model nondirektif adalah: (1) menciptakan sesuatu yang permisif melalui ekspresi bebas, (2) pengungkapan siswa mengemukakan perasaan, pemikiran dan masalah-masalah yang dihadapinya, guru menerima dan memberikan klarifikasi, (3) pengembangan pemahaman (*insight*), siswa mendiskusikan masalah, guru memberikan dorongan, (4) perencanaan dan penentuan keputusan, siswa merencanakan dan menentukan keputusan, guru memberikan klarifikasi, (5) integrasi, siswa memperoleh pemahaman lebih luas dan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif.

Dari keempat langkah termasuk langkah praksis pendidikan di sekolah yang telah diutarakan di atas diharapkan moralitas pendidikan dapat ditegakkan kembali. Tegaknya kembali moralitas pendidikan berarti juga tegaknya wibawa pendidikan. Sehingga aneka praktek pendidikan yang cenderung distorsif secara pelan-pelan dapat dieliminir sedikit demi sedikit yang pada gilirannya akan dapat dihilangkan secara permanen.

### **C. Kebijakan yang Membebaskan menuju Pendidikan Humanis-Religius**

Pendidikan humanis-religius memiliki konotasi pendidikan yang memanusiakan selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan humanis-religius lebih bermakna ketimbang pendidikan konvensional ataupun pendidikan modern yang condong ke aspek kognitif sehingga kurang bermakna. Oleh karenanya beberapa ahli menyebut pendidikan humanis-religius sebagai pendidikan yang bermakna. Konsep pendidikan humanis-religius atau bermakna merupakan kombinasi antara pedagogi kritis dan pendidikan partisipatoris. Pedagogi kritis menekankan dimensi kesadaran kritis dan proses emansipatoris, yaitu pendidikan yang membebaskan dari struktur-struktur buatan manusia yang menindas, baik itu pada tingkat produksi pengetahuannya maupun praksisnya.

Arah kebijakan pendidikan humanis-religius adalah membangun kesadaran kritis yang peka terhadap ketidakadilan dengan berazaskan nilai keagamaan sebagai proyek utama. Disamping itu pendidikan humanis-religius juga menekankan pendidikan partisipatoris sebuah proses pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam memproduksi pengetahuan dan menyelesaikan persoalan aktual yang dihadapi sehari-hari. Jadi proses pendidikan di sini adalah sebuah keterlibatan aktif dari peserta didik yang berorientasi pada pemecahan masalah. Dengan kata lain, pendidikan jenis ini haruslah bersifat historis dan sesuai dengan kondisi sosio-kultural lokal serta memiliki daya antisipatif visioner. Historis artinya, pendidikan mesti berangkat, berproses, dan berantisipasi secara dialektik dari pergulatan masyarakat sejak mengenal peradaban, hingga kekinian, dan masa depan. Dengan demikian, pendidikan humanis-religius watak utamanya adalah mengajari peserta didik berpikir bukan meniru, mengunyah bukan menelan, menanya bukan sekedar menerima, dan mengajari produktif bukan konsumtif. Pendidikan humanis-religius merupakan pilar utama dari sebuah bangunan bangsa.

Secara historis, dapat dianalisis bahwa pendidikan era kolonial Belanda sangat jauh dari konsep pendidikan humanis-religius atau bermakna. Pendidikan era kolonial tidak diniatkan untuk mendidik bangsa. Pendidikan sengaja dilakukan secara diskriminatif agar tetap memapankan struktur sosial-politik yang ada dan menindas. Bagi Belanda mendidik kaum terjajah tidak penting, tidak urgen, dan buang-buang waktu. Bahkan sejak awal bangsa ini di mata kolonial adalah bangsa bodoh, malas, dan sulit diajak maju, karena itu disebut *inlander* yang artinya ‘sekadar’ penghuni pulau.

Era kemerdekaan, pendidikan diambil alih oleh pemerintah yang sedang belajar memerintah. Ki Hadjar Dewantara menawarkan praktek pendidikan model pamong. Praktek pendidikan ini berbeda dengan praktek yang dilaksanakan penjajah. Praktek pendidikan yang ditawarkan Ki Hadjar Dewantara bersifat kritis karena melawan struktur mapan peninggalan kolonial, yang kemudian disebut sebagai pendidikan yang memerdekakan. Metode pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara jauh dari serba bebas dan membolehkan, karena salah satu prinsip utama adalah: “Tut wuri handayani” yang bermakna mengawasi dari belakang. Hal ini bila dimaknai secara politik membawa implikasi pada dibolehkannya model “demokrasi terpimpin” yang kemudian dipraktekkan oleh presiden Soekarno. Pendeknya, baik anak maupun orang dewasa hendaknya diawasi dan dikekang terus dengan tali kendalinya. Seperti diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara sendiri pada tahun 1940, “apakah kebebasan sejati itu? Bukan ketiadaan otoritas, tetapi kepandaian mengendalikan diri.” Jadi prinsip dasar suatu pendidikan yang baik adalah mengikuti tertib, tunduk (*nerimo, pasrah*), dan menguasai diri atau mawas diri (Denys Lombard, 2000: 138-139).

Era Orde Baru, praktek pendidikan yang dilakukan amat jauh dari bermakna karena semuanya diarahkan untuk pendisiplinan pikiran, semuanya serba sentralistik dan penuh semangat penyeragaman, pendidikan diabdikan sekedar untuk pertumbuhan ekonomi dengan basis-struktur industri yang ditopang oleh modal asing. Oleh karenanya pendidikan era Orde Baru lebih bersifat teknokratik.

Model pendidikan teknokratik ini menghasilkan lulusan yang menghamba kepada kepentingan pemilik modal atau kaum kapitalisme global. Lulusan yang dihasilkan malas berpikir, lebih suka imitatif, tidak lebih hanya generasi pengagum, penikmat, dan konsumtif. Dengan demikian, lembaga pendidikan adalah pabrik kesadaran palsu, bukan arena menyemaikan kesadaran kritis. Representasi murid adalah representasi yang dibentuk, dipandang, dan mengalami objektivikasi tanpa otonomi. Sekolah tidak menjadi arena bagi membangun kesadaran kritis yang menjadikan murid mampu sebagai subyek aktif dan memandang secara cerdas-kreatif dalam pergulatannya dengan perkembangan peradaban manusia (SB. Wahyono, 2018).

## SIMPULAN

Bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam rangka ikut memecahkan dan memberikan jalan keluar atas kemelut aneka macam problem sosial. Akan tetapi bila praktek pendidikan yang di dalamnya mengidap problem tersendiri akan mengalami kesulitan bahkan mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya. Salah satu di antara problem yang dialami oleh dunia pendidikan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas dalam praktek pendidikan. Oleh karenanya rekonstruksi atas moralitas pendidikan sangat perlu dilakukan demi terwujudnya praktek pendidikan yang humanis-religius.

Ada lima pilar moralitas pendidikan menurut Muhammad Abdurrahman (2003) yang dapat menjaga tegaknya penyelenggaraan pendidikan yang humanis religious, yaitu: (1) moralitas fardhiyyah, (2) moralitas usariyyah, (3) moralitas ijtimaiyyah, (4) moralitas daulah, dan (5) moralitas diniyyah.

Beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka mengembalikan tegaknya moralitas pendidikan sebagai upaya rekonstruksi adalah melalui mengembalikan praktek penyelenggaraan pendidikan kepada *khittah-nya* yaitu mengembalikan kepada misi pembebasan. Oleh karena penyelenggaraan pendidikan mengandung misi pembebasan, maka segala perangkat dan pendukung yang ada seperti guru, kurikulum, manajemen, model pembelajaran, sistem evaluasi, peraturan-peraturan yang diciptakan dan lain-lain keseluruhannya perlu diorientasikan kepada misi tersebut. Langkah berikutnya adalah pengikisan terhadap aneka praktek yang mendistorsikan nilai luhur pendidikan.

Kesemua hal tersebut diperlukan penguatan dalam praksis pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang menerapkan model pendidikan dan pembelajaran yang humanis-religius yaitu: (1) *Model Konsiderasi*, (2) *Model pembentukan rasional*, (3) *Klarifikasi nilai*, (4) *Pengembangan moral kognitif*, dan (5) *Model nondirektif*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. 2003. Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Capra, Fritjof. 1997. Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Cropley, Arthtur J. 2001. Creativity In Education and Learning. Great Britain: Kogan Page.
- Darmaningtyas. 1999. Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fagerlind, Ingemar and Saha, Lawrence J. 1983. Education and National Development. New York: Pergamon Press.
- Freire, Paulo. 2000. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Read.
- Illich, Ivan. 1971. Deschooling Society. New York: Harrow Books.
- Maarif, Syafii. 1991. Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, dalam Muslih Usa. 1991. Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sternberg, Robert J. and Jordan, Jennifer. 2005. A Handbook of Wisdom. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wahono, Francis. 2001. Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyono, SB. 2018. Ilmu Pendidikan: Landasan Filosofis, Rujukan Teoritik, dan terapannya. Uny Press: Yogyakarta.